

Islam Nusantara dan Diskursus Politik: Analisis Wacana Kritis Berita di CNN Indonesia

Mahmud Hibatul Wafi¹
Saipudin Ikhwan²
Tito Handoko³

Correspondence Author: ikhwansaipudin@gmail.com

Abstract: This paper reports on textual analysis research of three news media stories published by CNN Indonesia (*cnnindonesia.com*) in 2019 pertaining to *Islam Nusantara* and politics, using a critical discourse analysis approach proposed by Teun A. Van Dijk. Findings reveal that in the political context of *Islam Nusantara* (Islam of the Archipelago) discourse offers solutions to prevent conflict, tragedy, and violence in the name of religion. Further, it is also found that the political situation in Indonesia, which was rife with religious issues and increased intolerance, made *Islam Nusantara* dragged into the political sphere. This is because *Partai Kebangkitan Bangsa* (The National Awakening Party/PKB) which was historically born from the womb of the *Nahdlatul Ulama* was one of the ruling coalition parties.

Keywords: Islam Nusantara, discourse analysis, news, politics.

Abstrak: Artikel ini merupakan laporan penelitian analisis tekstual tiga berita tentang Islam Nusantara dan politik di media *cnnindonesia.com* tahun 2019. Dengan menggunakan analisis wacana kritis yang dikemukakan Teun A. Van Dijk, studi inimenemukan bahwa dalam konteks politik, wacana Islam Nusantara merupakan solusi bagi konflik, tragedi, dan kekerasan atas nama agama yang marak di Indonesia. Peneliti juga menunjukkan situasi politik di Indonesia yang sarat dengan isu agama dan meningkatnya intoleransi, membuat Islam Nusantara terseret ke ranah politik. Pasalnya, Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai koalisi yang berkuasa.

¹ State Islamic Institute (IAIN) Kerinci, Jambi

² State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

³ Riau University (UNRI)

Pendahuluan

Hubungan Islam dengan Indonesia yang menerapkan sistem politik demokrasi sampai hari ini terus menjadi persoalan. Menjalankan agama secara *kaffah* menjadi alasan sekelompok orang untuk menegakkan negara Islam di Indonesia. Perjuangan menegakkan negara Islam itu tidak jarang dilakukan dengan kekerasan. Fakta sejarah menunjukkan, beberapa kali pemberontakan dilakukan atas nama memperjuangkan tegaknya negara Islam seperti yang dilakukan Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/NI) pada tahun 1950 dan 1960 (Azra, 2012). Pada posisi lain, banyak pula Ulama yang berpandangan bahwa untuk menjalankan Islam tidak mesti mendirikan negara Islam. Ulama yang berada di Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, menerima Pancasila sebagai dasar negara demi menjaga kesatuan Indonesia dan menjaga keberadaan agama-agama yang hidup di Indonesia.

Pertentangan pandangan terkait Negara Islam tersebut disebabkan oleh gerakan transnasional yang masuk ke Indonesia. Di Indonesia istilah Islam transnasional disampaikan pertama kali oleh KH. Hasyim Muzadi pada tahun 2007. Istilah itu merujuk pada ideologi keagamaan lintas negara yang diimpor dari luar dan dikembangkan di Indonesia (Aksa, 2017). Ideologi transnasional terbentuk karena kolonialisme Barat di negara-negara muslim atau negara mayoritas penduduk muslim yang mengakumulasi penderitaan umat Islam. Jamaluddin Al-Afghany misalnya, membentuk patriotisme atas dasar solidaritas keagamaan yang disebut Pan-Islamisme (Aksa, 2017).

Dari perkembangan ide gerakan Islam transnasional tersebut, NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia tidak tertarik untuk mengupayakan berdirinya negara Islam. Bagi NU, menerima Pancasila sebagai jalan tengah untuk menjaga kesatuan Indonesia, sekaligus menjaga keberadaan agama. Sebenarnya, sebelum Indonesia merdeka NU telah mengatakan bahwa Indonesia sejatinya adalah negara Islam. Hal itu ditegaskan melalui Kongres ke-11 tahun 1936 di Banjarmasin. Pandangan itu disandarkan pada alasan, karena rakyat Indonesia sebagian besar adalah Muslim, dan tidak ada larangan menjalankan

syariat meskipun dipimpin oleh Belanda (Khamdan & Wiharyani, 2018, hlm. 507).

Seperti yang telah disebutkan, bahwa hubungan antara Islam dan Indonesia sebagai negara sampai hari ini masih dipersoalkan. Beberapa tahun terakhir misalnya, publik diguncangkan dengan wacana *khilafah* yang dilemparkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (kompas.com). Narasi bahwa Indonesia tegak di atas sistem *kufur* dan Indonesia negara *thoghut* terus digulirkan ke publik (tribunnews.com). Kasus terakhir adalah tidak diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) juga karena menurut pemerintah ada cita-cita *khilafah* yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI (merdeka.com).

Meruncingnya persoalan itu tidak terlepas dari pengaruh perkembangan media baru yang mampu menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Kehadiran media baru itu dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi seperti pandangan terhadap agama dan negara. Misalnya yang dilakukan oleh Nahdatul Ulama (NU) dalam menyebarkan narasi Islam Nusantara sebagai Islam NU, juga melalui media baru (Safitri, 2018).

Islam Nusantara sudah dikenalkan NU sejak ditetapkan sebagai tema Muktamar NU ke-33 di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015. Tema muktamar NU saat itu berkaitan dengan Islam Nusantara dan kontribusinya untuk peradaban Indonesia dan dunia. Kemudian, sampai saat ini Islam Nusantara terus dibicarakan tidak hanya dalam konteks agama, tetapi juga dalam konteks politik. Islam Nusantara disampaikan ke publik dengan narasi sebagai penangkal radikalisme, seperti yang dikatakan oleh Kapolri Jendral Tito Karnavian pada Januari 2017 (kompas.com). Klaim Islam Nusantara sebagai bentuk khas dari Islam di Indonesia dan Islam yang toleransi serta menjadi antitesa dari 'Islam Arab' menimbulkan perdebatan (bbc.com). Istilah 'Islam Arab' ini sering disematkan kepada kelompok-kelompok seperti HTI, Wahabi, dan FPI yang notabene berada dalam posisi berseberangan dengan NU sebagai ormas yang mempopulerkan istilah Islam Nusantara.

Artikel ini membicarakan bagaimana perdebatan wacana Islam Nusantara pada konteks politik di media online *cnnindonesia.com* sepanjang tahun 2019. Studi mengenai Islam Nusantara telah banyak ditulis oleh para sarjana, seperti (Dini Safitri, 2018; Abdurahman, 2018; Muh. Khamdan dan Wiharyani, 2018). Dini Safitri (2017) melakukan studi tentang retorika Islam Nusantara elite intelektual NU di media *online*. Hasil penelitiannya, dengan melakukan analisis retorika model GWC Stephen Toulmin menemukan bahwa Islam Nusantara adalah Islam NU yang tidak ingin melokalkan Islam. Islam Nusantara lebih merupakan usaha untuk memahami dan menerapkan Islam tanpa mengesampingkan tempat Islam diimani dan dipeluk. Namun masih salah dipahami oleh ormas Islam di luar NU. Mereka beranggapan bahwa Islam Nusantara akan memecah kesatuan Islam yang universal dan anti budaya Arab.

Berbeda dengan Safitri (2018), Ade Irfan Abdurahman (2018) melakukan studi tentang pertarungan wacana Islam Nusantara di media *online*. Hasilnya dengan menggunakan analisis wacana Teun A Van Dijk, ditemukan bahwa konstruksi wacana Islam Nusantara dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kelompok Nahdatul Ulama dan kelompok pengkritik. Melalui analisis sosial teks, dalam studi ini ditemukan enam faktor mengapa kelompok pengkritik itu ada, yaitu: *Pertama*, wacana Islam Nusantara dikaitkan dengan konteks politik. *Kedua*, adanya perdebatan mendasar terkait cara menerapkan wacana Islam Nusantara. *Ketiga*, adanya perbandingan tajam di antara Islam Nusantara melawan Islam Arab. *Keempat*, Islam Nusantara sebagai konsep konter radikalisme. *Kelima*, Islam Nusantara milik satu golongan dan kelompok. *Keenam*, klaim seolah-olah mereka yang setuju gagasan Islam Nusantara adalah yang paling kokoh dan *istiqamah* menjaga kebhinekaan negeri ini.

Selain itu, Khamdan & Wiharyani (2018) melakukan studi tentang *Islam Nusantara in Political Contestation Identity Religion in Indonesia*. Hasilnya adalah bahwa relasi agama dan negara oleh ulama-ulama Nahdatul Ulama (NU) dianggap dalam hubungan akomodatif dengan mempertahankan nasionalisme Indonesia tanpa membedakan agama, suku, dan golongan merupakan wajah Islam Nusantara di

Indonesia. Politik sebagai sumber radikalisme diredam oleh ulama NU dengan fatwa penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan semangat Islam Nusantara.

Secara umum, studi-studi sebelumnya tentang Islam Nusantara masih berada pada tataran bagaimana retorika NU dalam memperkenalkan Islam Nusantara menjadi konsep yang sesuai dengan Indonesia dan bagaimana Islam Nusantara diperbedakan oleh kalangan muslim di luar NU. Sepengetahuan peneliti, belum ada studi yang membahas bagaimana Islam Nusantara dibicarakan dalam konteks politik, khususnya di media *online*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan teknik analisis wacana model Teun A. Van Dijk. Analisis wacana ini menaruh fokus pada upaya melakukan pembongkaran aspek- aspek yang tersembunyi di balik sebuah teks, seperti kognisi sosial, perubahan sosial, dan sesuai dengan konteks wacana tersebut diproduksi.

Analisis wacana model Teun A Van Dijk terdiri dari tiga elemen yaitu dimensi teks, kognisi sosial, dan analisis sosial. Dimensi teks melihat teks dari beberapa struktur teks yang mendukung antara satu dan lainnya. Pertama yaitu struktur makro adalah makna umum dari suatu teks yang dapat analisis dengan melihat tema atau topik yang sengaja dikedepankan dalam suatu berita. Kedua, superstruktur yang merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Ketiga, yaitu struktur mikro, makna wacana yang diamati dari suatu bagian kecil teks seperti kata, kalimat, parafrase, anak kalimat, proposisi, dan gambar. Kognisi sosial berkaitan dengan bagaimana suatu teks diproduksi, elemen ini melihat kesadaran yang membentuk teks tersebut. Sedangkan dimensi sosial adalah analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana kondisi sosial saat

Metodologi

teks diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat (Abdurahman, 2018, hkm. 195).

Fokus kajian pada penelitian ini dibatasi pada analisis wacana Islam Nusantara di media *online cnnindonesia.com* dalam konsteks politik. Penulis memilih *cnnindonesia.com* karena memiliki jumlah pembaca yang banyak dan dikenal sebagai media yang kritis serta berimbang dalam pemberitaan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam melihat wacana Islam Nusantara di Media online pada konteks politik peneliti melakukan analisis wacana model Teuan A Van Dijk. Penelitian ini diawali dengan mencari berita-berita di situs *cnnindonesia.com* yang memuat judul atau isi berita tentang Islam Nusantara selama tahun 2019. Pada proses itu penulis menemukan tiga berita yang berkenaan dengan objek penelitian, lalu peneliti melakukan analisis.

Tabel 1. ‘Tiga berita di *CNNIndonesia* sebagai obyek penelitian’

Nomor	Judul	Tanggal Publikasi
Berita 1	Jokowi: Saya Selalu Merasa Adem kalau Bersama Kiai NU	31 Januari 2019
Berita 2	Menakar Kekalahan Telak Jokowi dari Prabowo di Sumatra Barat	23 April 2019
Berita 3	Muktamar PKB Hasilkan Deklarasi Bali, Dukung Islam Nusantara	21 Agustus 2019

Berita Pertama

Berita Pertama, “Jokowi: Saya Selalu Merasa Adem kalau Bersama Kiai NU” edisi Kamis, 31/01/2019. Berita ini terbit pada masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Isi berita ini memperlihatkan bahwa Jokowi

mempersoalkan efek negatif dari perkembangan teknologi komunikasi yang berakibat pada saling hina, saling cela, dan fitnah di media sosial. Kemudian Jokowi mengaitkan fenomena itu dengan banyaknya orang yang melupakan nilai-nilai luhur dalam ajaran agama, etika, sopan santun, dan lupa pada komitmen tentang keindonesiaan.

Struktur Makro

Topik (struktur makro) pada berita pertama adalah bahwa beragama dengan cara NU adalah beragama dengan cara yang sejuak, moderat dan mampu menjaga semangat kebangsaan. Terlihat jelas dengan pemilihan judul berita yang menggambarkan kedamaian jika bersama kiai NU. Kemudian didukung dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi dalam pidatonya meminta warga NU tetap menjaga dan merawat komitmen keagamaan serta kebangsaan.

Suprastruktur

Skema (superstruktur) dalam berita ini disusun menjadi tiga tahapan yang memperlihatkan satu kesatuan. Pertama, pernyataan Jokowi bahwa ia merasa *adem* ketika bersama kiai NU. Kedua, ia menjelaskan kondisi Indonesia hari ini yang tidak lagi toleran karena pengaruh perkembangan teknologi komunikasi. Ketiga, penjelasan bahwa perbedaan yang ada di Indonesia adalah hukum alam (*sunmah* Allah) dan harus selalu dijaga sehingga semangat toleransi selalu tumbuh.

Struktur Mikro

Pemilihan diksi (struktur mikro) dalam pidato Jokowi yang ditulis di *cnnindonesia.com* mengandung keselarasan dengan tema dan alur. Beberapa kutipan bisa dianalisis, di antaranya:

1. “Saya selalu merasa *adem* kalau hadir bersama para kiai dan jamiyah NU....” (*cnnindonesia.com* 31/01/2019)
2. “....Lupa pada *etika*, lupa pada tata *krama*, lupa pada *sopan santun*, lupa kepada *komitmen* tentang *keindonesiaan*.....” (*cnninconesia.com* 31/01/2019)

3. "... perbedaan, warna warni, negara kita betul-betul telah menjadi *sunnah* Allah yang telah diberikan pada bangsa Indonesia. Ini yang harus terus menerus kita jaga, sehingga nilai-nilai saling menghargai harus terus kita kembangkan" (*cnnindonesia.com* 31/01/2019).

Pada teks 1, pemilihan diksi "adem" menjelaskan bahwa secara pribadi Jokowi nyaman dengan NU baik kiai hingga jamaahnya. Seperti yang diketahui bahwa NU adalah Ormas Islam yang menawarkan konsep Islam Nusantara. Pada teks 2, kata etika, tata krama, sopan santun, dan komitmen kebangsaan memperlihatkan wacana dalam pidato Jokowi, menurutnya Indonesia hari ini sudah jauh dari hal tersebut. Pada teks 3, Jokowi menegaskan bahwa perbedaan adalah hukum (*sunnah*) Allah untuk Indonesia, lalu meminta warga NU untuk merawat semangat keagamaan dan kebangsaan yang diwujudkan dengan saling menghargai.

Kognisi Sosial

Jokowi menyatakan sebuah proposisi berdasarkan pengetahuannya yang diperoleh dari pengalaman. Pengetahuan ini selanjutnya disebarkan kembali dalam pidatonya di hadapan para Ulama NU pada acara peringatan hari lahir NU ke-93 di Jakarta. Hal ini dapat kita lihat pada teks 1, dimana ia menyatakan bahwa merasa *adem* saat bersama kiai NU. Ini merupakan sebuah pengetahuan yang didapat dari hasil pengalaman pribadi.

Dimensi Sosial

Pada bagian ini (dimensi sosial), peneliti menemukan kondisi yang sedang berkembang di masyarakat yang secara langsung terkait dengan isi pidato Jokowi. Saat berita ini dimuat, terkhusus saat Jokowi berpidato pada acara memperingati hari lahir NU ke-93 di Jakarta, kondisi Indonesia sedang memasuki masa kampanye. Dimana seperti yang diketahui dari berbagai media masa, bahwa pada masa kampanye Pilpres 2019 suhu perpolitikan semakin panas. Kondisi masyarakat pada saat itu banyak diterpa oleh *hoaks* dan kekerasan simbol di media

sosial. Bahkan tidak sedikit tokoh yang mengatakan bahwa telah terjadi politik identitas dan polarisasi di tengah-tengah masyarakat (Kiftiyah, 2019). Perang medsos tidak terelakkan, bahasa-bahasa yang tidak sopan bertaburan di laman media sosial. Dimensi sosial ini yang membuat Jokowi berpidato dengan narasi menjaga toleransi dan semangat keagamaan serta kebangsaan.

Berita Kedua

Berita kedua, “Menakar Kekalahan Telak Jokowi dari Prabowo di Sumatra Barat” edisi Selasa, 23/04/2019. Berita ini terbit setelah pemilihan presiden dan wakil presiden selesai. Isi berita ini terkait raihan suara Jokowi-Ma’ruf yang sangat kecil di Sumatera Barat (Sumbar). Penulis mengambil pendapat seorang pengamat politik yang bernama Asrinaldi untuk menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan telak Jokowi di Sumbar. Dijelaskan pula bahwa Jokowi telah berusaha untuk meningkatkan suaranya akan tetapi tetap gagal.

Struktur Makro

Topik (struktur makro) pada berita kedua ini tentang penyebab kekalahan telak Jokowi di Sumbar. Pemilihan judul “Menakar Kekalahan Telak Jokowi dari Prabowo di Sumatra Barat” menunjukkan keterikatan topik pada berita ini. Terdapat dua alasan yang diajukan, pertama adalah karena falsafah hidup orang Minang, yaitu *adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah*. Kedua, karena isu PKI sudah begitu kuat menerpa Jokowi dan masyarakat Sumbar terpengaruh terhadap itu.

Suprastruktur

Skema (superstruktur) dalam berita kedua ini disusun menjadi empat tahapan yang menjadi satu kesatuan. Pertama, pembahasan tentang kekalahan telak Jokowi terlihat dari hasil hitung cepat oleh beberapa lembaga seperti Indikator Politik, Poltracking, dan Indobarometer. Kedua, menggambarkan kondisi ketika pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014, dimana Sumbar adalah

lambung suara dari pasangan calon Prabowo-Hatta. Ketiga, penulis mengulas bagaimana Jokowi telah berusaha meningkatkan perolehan suara agar lebih banyak dari perolehan pada tahun 2014. Keempat, penjelasan tentang alasan mengapa Jokowi tetap tidak bisa mencuri hati masyarakat Sumbar meskipun telah berupaya.

Struktur Mikro

Pada wilayah (struktur mikro) seorang narasumber yang bernama Asrinaldi, ia memaparkan analisisnya terhadap kekalahan telak Jokowi di Sumbar. Menurutnya faktor utama dari kekalahan itu adalah karena falsafah orang Minang, yaitu *adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*. Untuk menganalisis wacana Islam Nusantara dalam konteks politik pada berita ini, kita perlu melihat dua kutipan berita berikut.

1. "... walau banyak kebijakan seperti Islam nusantara, namun pemahaman komunisme membuat orang tidak simpati," kata Asrinaldi kepada *cnnindonesia.com* (23/04/2019).
2. "Rasa antipati untuk memilih Jokowi semakin meningkat ketika falsafah 'ABS-SBK' yang dipegang warga Sumbar kian diperparah isu-isu terkait agama dan suku yang bertebaran dibungkus oleh berita bohong alias hoaks.." (*cnnIndonesia.com* 23/04/2019)

Pada teks 1, narasumber memilih kata Islam Nusantara untuk menggambarkan kebijakan Jokowi terhadap Islam. Pemilihan diksi "banyak kebijakan seperti Islam Nusantara" oleh narasumber menunjukkan bahwa Islam Nusantara masuk dalam perdebatan politik di masyarakat Sumbar. Kata "rasa antipati" pada teks 2 menurut peneliti memiliki nuansa emosional, seseorang yang tidak memilih Jokowi pada saat Pilpres, tidak serta-merta langsung menjadi antipati terhadapnya.

Kognisi Sosial

Pada wilayah ini (Kognisi Sosial), yang dijelaskan oleh narasumber adalah opini bukan fakta. Terkait alasan kekalahan Jokowi di Sumbar, yang dikatakan karena falsafah "*adat bersendika syara', syara' bersendikan kitabullah*" misalnya, itu bisa dikatakan sebuah

opini, karena tidak ada data yang disajikan. Pendapat narasumber dapat dilihat dalam teks “*walaupun banyak kebijakan seperti Islam nusantara.....*,” pada teks ini terlihat bahwa proposisi ini merupakan pendapat pribadi penulis. Pada teks sebelumnya dijelaskan bahwa kekalahan Jokowi di Sumbar sudah sejak pemilihan presiden tahun 2014.

Berdasarkan penelusuran peneliti, Islam Nusantara baru benar-benar diperkenalkan NU sebagai tema Muktamar NU ke-33 di Jombang pada Agustus 2015 (Abdurahman, 2018), sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada tahun 2019. Artinya, jika kita mengamati apa yang disampaikan oleh narasumber kepada *cnndonesia.com*, terlihat bahwa pada wilayah politik Jokowi dianggap mendukung wacana Islam Nusantara sudah sejak lama.

Dimensi Sosial

Pada bagian ini (Dimensi Sosial), peneliti melihat adanya keterkaitan dengan keadaan sosial yang sedang terjadi di masyarakat Sumbar. Pada 25 Juni 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar mengeluarkan sikap untuk menolak Islam Nusantara. Penolakan MUI Sumbar terhadap Islam Nusantara ini dianggap serius (Sapriillah, 2018). Keputusan tersebut dilakukan melalui rapat formal dan tersebar luas ke masyarakat, khususnya masyarakat Sumbar. Dimensi sosial inilah yang melatarbelakangi pendapat narasumber bahwa meskipun Jokowi banyak berbuat untuk Islam, tapi hanya pada golongan Islam Nusantara, sehingga masyarakat Sumbar tetap menganggap Jokowi tidak peduli terhadap Islam.

Berita Ketiga

Berita ketiga, “Muktamar PKB Hasilkan Deklarasi Bali, Dukung Islam Nusantara” Rabu, (21/08/2019). Berita ini berisi poin-poin deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Muktamar ke-V di Bali. Salah satu poin deklarasi yang juga menjadi bagian dari redaksional judul berita adalah mendukung Islam Nusantara.

Struktur Makro

Topik (struktur makro) pada berita ketiga ini tentang dukungan PKB untuk Islam Nusantara. Pemilihan judul “Muktamar PKB Hasilkan Deklarasi Bali, Dukung Islam Nusantara” menegaskan hal tersebut. Sebenarnya terdapat sembilan sikap politik PKB terkait deklarasi tersebut, akan tetapi penulis memilih Islam Nusantara yang menjadi redaksional judul.

Superstruktur

Skema (superstruktur) dalam berita ketiga ini disusun menjadi tiga bagian yang menjadi satu kesatuan. Skema pertama, membahas terkait poin dimana PKB mendukung penuh konsep Islam Nusantara. Dalam keterangannya PKB berkeyakinan Islam Nusantara adalah solusi dari konflik dan tragedi kemanusiaan atas nama agama yang terjadi. Penjelasan itu ditunjang dengan keterangan lebih lanjut dalam kutipan berikut:

“Sebagai negara muslim terbesar di dunia Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk terus mengkampanyekan moderasi Islam dalam rangka memperbaiki peradaban dan menciptakan tata dunia yang damai.” (*cnnindonesia.com* 21/08/2019)

Penjelasan lanjutan tentang dukungan terhadap Islam Nusantara ini bukan sebuah pernyataan dari sumber berita, akan tetapi keterangan dari satu poin yang ada dalam Deklarasi Bali.

Skema kedua, menggambarkan keyakinan ketua umum PKB bahwa deklarasi tersebut akan didukung oleh masyarakat. Keyakinan itu didasarkan pada alasan bahwa PKB menjadi salah satu partai pendukung Jokowi-Ma’ruf dalam pemerintahan selama lima tahun ke depan. Skema ketiga, berita ini merincikan sembilan poin deklarasi PKB yang dihasilkan oleh muhtamar ke-V di Bali.

Struktur Mikro

Pada wilayah (struktur mikro) peneliti menemukan diksi yang memiliki keteritakan tema dan skema. Untuk menganalisis struktur mikro dalam berita ini, kita perlu melihat dua kutipan berita berikut.

1. “Salah satunya adalah sikap politik untuk mempromosikan Islam Nusantara dan moderasi Islam di Indonesia. PKB berkeyakinan bahwa mempromosikan Islam Nusantara sebagai solusi untuk mengatasi berbagai konflik dan tragedi kemanusiaan atas nama agama.” (*cnnindonesia.com* 21/08/2019)
2. “Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar meyakini semua poin yang terkandung dalam Deklarasi Bali akan merebut masyarakat Indonesia untuk mendukung mereka. Terlebih lagi, PKB akan menjadi salah satu motor pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf selama lima tahun ke depan.” (*cnnindonesia.com* 21/08/2019)

Teks 1 pada berita ketiga ini menggunakan bahasa yang aktif, jelas dan meyakinkan bahwa Islam Nusantara adalah solusi dari banyaknya konflik kemanusiaan yang mengatasnamakan agama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam Nusantara adalah antitesa dari Islam yang selama ini digambarkan keras, intoleran, dan menyebabkan banyak tragedi kemanusiaan.

Sedangkan pada teks 2, terdapat penekanan maksud bahwa PKB sebagai salah satu pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf akan lebih mudah untuk mewujudkan poin-poin deklarasi, termasuk mempromosikan Islam Nusantara. Dari kedua teks tersebut, peneliti melihat bahwa wacana Islam Nusantara akan lebih mudah berkembang karena PKB yang notabene adalah partai orang NU (Mayrudin dan Akbar, 2019) dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menjadi pengusung utama. Terlebih lagi posisi Kiai Ma’ruf Amin yang juga merupakan sepuh NU menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia.

Kognisi Sosial

Pada wilayah ini (Kognisi Sosial), peneliti menjelaskan elemen kognisi sosial yaitu ideologi. Elemen ideologi membahas tentang fondasi dari representasi sosial yang disebarkan oleh kelompok. Dalam politik, ideologi memainkan peran untuk mendefinisikan sistem politik, organisasi, gerakan, praktik politik, dan kognisi politik,

semuanya diproduksi oleh wacana politik (Humaidi, 2017). Proposisi-proposisi yang menyangkut persoalan itu dapat diamati pada salah satu teks pidato, sebagai berikut:

“Salah satunya adalah sikap politik untuk mempromosikan Islam Nusantara dan moderasi Islam di Indonesia. PKB berkeyakinan bahwa mempromosikan Islam Nusantara sebagai solusi untuk mengatasi berbagai konflik dan tragedi kemanusiaan atas nama agama.” (*cnnindonesia.com* 21/08/2019)

Pada teks di atas, penulis mengatakan akan mempromosikan Islam Nusantara dan moderasi Islam di Indonesia. Proposisi ini merupakan salah satu sikap yang ditunjukkan oleh PKB sebagai partai yang mendeklarasikan dukungan terhadap Islam Nusantara. Penjelasan bahwa Islam Nusantara adalah solusi atas banyak konflik kemanusiaan yang mengatasnamakan agama menunjukkan keterkaitan ideologi. Terlihat jelas bahwa ideologi NU adalah Islam moderat, Islam yang tidak membuat konflik menjaga kerukunan antar manusia. Secara politik, PKB adalah partai yang dibentuk oleh Abdurrahman Wahid, yang juga merupakan tokoh NU, juga mantan Ketua Umum PBNU (Mayrudin dan Akbar, 2019). Artinya, terdapat kognisi sosial tentang moderasi Islam yang tersematkan pada wacana Islam Nusantara dan berkaitan dengan sikap politik PKB.

Dimensi Sosial

Pada dimensi ini, pembahasan dilakukan dengan mengamati keadaan atau kondisi yang berkembang di masyarakat terkait dengan isi deklarasi dukungan PKB terhadap Islam Nusantara. PKB dalam berita ini mengklaim bahwa Islam Nusantara sebagai solusi untuk mengatasi berbagai konflik dan tragedi kemanusiaan atas nama agama. Pengaruh sosial terhadap munculnya deklarasi dukungan terhadap Islam Nusantara ini salah satunya dapat diamati dari teks “Sebagai negara Muslim terbesar di dunia Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk terus mengkampanyekan moderasi Islam dalam rangka memperbaiki peradaban dan menciptakan tata dunia yang damai”.

Keadaan sosial ini menjadi faktor dari lahirnya dukungan terhadap Islam Nusantara yang dimotori oleh NU.

Islam Nusantara: Dari Sosiokultural ke Politik

Sejak runtuhnya Orde Baru dari tampuk kekuasaannya pada 21 Mei 1998, mengakibatkan terjadi perubahan yang drastis dalam percaturan sosial-politik. Perubahan dalam bidang sosial politik ini sangat menentukan bagaimana masa depan bangsa Indonesia. Jatuhnya Orde Baru tidak meninggalkan situasi yang stabil, bahkan akhirnya menjadi pemicu terjadi gejolak dan meningkatnya suhu politik nasional setelahnya.

Peristiwa tumbang rezim Orde Baru tahun 1998 itu, kemudian mampu mengubah dasar-dasar konstelasi sosial politik: Pertama, hancurnya hegemoni Orde Baru dengan pilar utamanya yaitu Golkar yang ditopang oleh sistem birokrasi dan militer. Kedua, lahirnya sistem politik multipartai yang memungkinkan bagi setiap kelompok politik yang beragam latar belakang muncul dengan aspirasi masing-masing. Ketiga, menyebabkan adanya pergeseran hubungan antara Islam dan negara (Ubaidillah, 2017).

Lahirnya masa reformasi memunculkan lagi gerakan-gerakan Islam yang bangkit kembali untuk memperjuangkan aspirasi Islam, yang pada masa Orde Baru ditekan sehingga tidak bisa muncul di pentas politik nasional. Penekanan itu terjadi kurang lebih selama tiga dekade, hal itu ternyata tidak melemahkan gerakannya, bahkan menjadikan reformasi sebagai momentum kebangkitannya di tengah perubahan perebutan kekuasaan politik. Gerakan Islam yang bangkit kembali ini memiliki dua tipikal: struktural dan kultural.

Gerakan Islam struktural terlihat dengan gencarnya pendirian partai-partai Islam, seperti Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Umat, Partai Ummat Islam, Partai Nahdlatul Umat, Partai Syarikat Islam Indonesia, Masyumi, Masyumi Baru, dan Partai Bintang Reformasi. Sedangkan pada wilayah gerakan Islam kultural ditandai dengan maraknya sejumlah Ormas Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir (Ubaidillah, 2017). Bangkitnya gerakan Ormas Islam (kultural) ini

indentik dengan karakternya yang fundamentalistik, formalistik, radikal serta militan. Dalam perspektif ini, Islam harus terwujud secara formal kelembagaan sebagaimana tampak dalam bentuknya seperti partai Islam, negara Islam, sistem ekonomi Islam dan berbagai label Islam lainnya.

Sebagai antitesa dari gerakan Islam yang mengharuskan terwujud Islam secara formal kelembagaan, terdapat pula perspektif lain, yaitu suatu gerakan yang memiliki corak pemikiran berbeda, dimana mereka menghendaki hubungan Islam dengan semua aspek kehidupan dilakukan secara substansial. Dalam perspektif ini, Islam dilihat lebih pada tataran moral, etik dan spiritual (Ubaidillah, 2017). Dengan pemaknaan seperti ini, maka Islam ditampilkan dengan menonjolkan watak yang inklusif.

Kemudian dalam hubungannya dengan negara, cara pandang seperti ini menginginkan lahirnya, meminjam istilah Mukti Ali, *agree in disagreement* sebagai dasar moral kehidupan dalam berbangsa yang majemuk (Sachedina, 2005), sehingga tercipta masyarakat yang sadar kerukunan dan saling menghargai (Abizar, 2019). Mereka tidak bersikeras memperjuangkan ideologi Islam dengan mendirikan negara Islam secara formal. Salah satu Organisasi Islam yang sejak dulu berada dalam perspektif ini adalah Nahdlatul Ulama (NU) yang belakangan ini menawarkan konsep Islam Nusantara.

Islam Nusantara memiliki konsep bahwa Islam dapat dilaksanakan dengan damai, tidak dengan cara memaksa, serta dapat menghargai kearifan lokal (Mubarok & Rustam, 2018). Islam Nusantara muncul sebagai pemikiran alternatif, yang mendepankan pengamalan Islam yang moderat, terlepas dari paham liberalisme dan fundamentaslime. Islam Nusantara secara serius menawarkan konsep dan gagasan anti *mainstream*. Gagasan Islam Nusantara ini diharapkan dapat membangun keharmonisan baik pada bidang agama, sosial budaya serta diharapkan mampu berkontribusi membangun peradaban Islam di Indonesia.

Nahdlatul Ulama mewacanakan Islam Nusantara sebagai bentuk Islam yang tetap teguh melestarikan bentuk-bentuk kebudayaan lokal (Madjid, 1992, hlm. 552). Akan tetapi wacana Islam Nusantara ini

sengaja atau tidak terseret dalam konteks politik. Dimulai dari Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017, hingga sampai pada konstelasi politik pada tahun 2019 politik Indonesia marak dengan menggunakan isu agama. Islam muncul dengan wajah yang sangar, intoleran dan membenci agama lain. Pada posisi seperti ini NU dengan Islam Nusantaranya muncul sebagai antitesa dari itu, Islam Nusantara digambarkan sebagai wujud Islam yang damai, dan moderat. NU menerima Pancasila sebagai dasar negara dan menjadikan hubungan agama-negara harmonis dalam tataran moral, etik dan spritual. Konsep keislaman yang bercorak inklusif-pluralis dan substansialisme Islam ala NU ini secara langsung berhadapan dengan model formalisasi syariat Islam di Indonesia seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI) dan Front Pembela Islam (FPI) (Azra, 2004). Situasi perpolitikan Indonesia yang marak dengan isu agama dan eksisnya kelompok seperti HTI yang bercita-cita mendirikan sistem khilafah ini menyeret wacana Islam Nusantara ke wilayah politik.

Penelitian ini membahas bagaimana wacana Islam Nusantara dibicarakan pada konteks politik, terkhusus yang ada di media online *cnnindonesia.com*. Terdapat tiga berita tentang Islam Nusantara pada konteks politik sepanjang tahun 2019 di *cnnIndonesia.com*. Berita pertama memiliki topik keberagaman dan semangat toleransi serta komitmen keindonesiaan. Pada teks tersebut, Jokowi menggambarkan bagaimana NU sebagai pengusung Islam Nusantara mampu mengembangkan semangat toleransi. Selain itu, kata “*adem*” yang digunakan Jokowi ketika berada dekat dengan Kiai NU menunjukkan bahwa NU mampu memberikan rasa damai. Setelah dianalisis lebih jauh, dapat kita katakan bahwa Jokowi secara politik lebih dekat dengan NU yang secara organisasi adalah manifestasi dari kelompok-kelompok Islam moderat.

Pada teks berikutnya Jokowi menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia yang terkena dampak dari perkembangan teknologi komunikasi. Beberapa dampak yang dijelaskan Jokowi adalah lupanya masyarakat dengan etika, tata karma, sopan santun dan lupa pada komitmen tentang keindonesiaan. Setelah dianalisis, kita temui tidak

ada hubungan langsung yang meyakinkan bahwa lupa akan komitmen keindonesiaan disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi. Akan tetapi peneliti mendapatkan toleransi antara apa yang disampaikan Jokowi tentang komitmen keindonesiaan dengan keadaan atau dimensi sosial yang ada pada saat itu. Seperti halnya pernyataan Jokowi tentang lupa etika, tata karma, dan sopan santun memiliki koneksi yang kuat dengan situasi politik Indonesia yang semakin panas. Ujaran kebencian dan berita hoaks beredar dimana-mana, masyarakat tidak segan untuk saling caci jika berbeda pilihan politik. Hal ini yang Jokowi maksud dengan lupa terhadap komitmen keindonesiaan. Pada teks selanjutnya, Jokowi menegaskan bahwa sudah takdir Tuhan Indonesia memiliki beragam perbedaan di antara masyarakat, yang dibahasakan oleh Jokowi dengan kata “warna-warni” Indonesia. Kemudian Jokowi mengatakan bahwa hukum atau takdir Tuhan itu harus kita jaga. Sebagaimana pada lanjutan teks tersebut, Jokowi meminta untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai saling menghargai perbedaan tersebut. Tidak hanya sampai di situ, pada keterangannya “...*Jokowi menitip amanat kepada warga NU agar tetap merawat komitmen keagamaan dan kebangsaan...*”. Jokowi meminta NU turut menjaga semangat dan komitmen kebangsaan tersebut. Pada konteks itu bisa kita melihat keterkaitan teks-teks tersebut yang menjadi wacana Islam Nusantara yang lahir dari tokoh-tokoh NU.

Berita kedua memiliki topik penyebab Jokowi-Ma'ruf kalah telak di Sumbar. Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa alasan utama dari kekalahan Jokowi adalah karena isu PKI dan pandangan masyarakat Sumbar bahwa Jokowi jauh dari agama. Hal ini ditunjang oleh falsafah “*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*” yang dimiliki oleh masyarakat Sumbar. Pada bagian ini yang menjadi fokus analisis peneliti adalah pada bagaian kata yang menggambarkan bahwa Jokowi dekat dengan Islam Nusantara.

Pemilhan kalimat “*banyak kebijakan seperti Islam nusantara.....*,” sebenarnya menunjukkan bahwa, bagi narasumber selama ini kebijakan Jokowi mendukung Islam Nusantara. Artinya, bahwa Islam Nusantara masuk dalam perdebatan politik khususnya masyarakat Sumbar. Hasil dari data tambahan yang didapatkan, memang Islam Nusantara yang

dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama kerap kali dikaitkan dengan Koalisi Pemerintahan Jokowi-JK, hal ini disebabkan karena PKB adalah partai politik yang diyakini menjadi representasi politik Nahdlatul Ulama berada pada lingkaran koalisi pemerintah. Sebagai salah satu bukti yang bisa kita lihat adalah saat Presiden Jokowi menetapkan Barus sebagai titik nol Islam Nusantara (Abdurahman, 2018). Bahkan sebelumnya, pada saat pembukaan Munas alim Ulama 4 Juni 2015, Jokowi secara terang bersyukur karena Indonesia memiliki Islam Nusantara (nu.or.id 14/06/2015). Jokowi mengaitkan dengan kondisi Timut Tengah yang hancur lebur karena perang saudara, dan membandingkannya dengan Indonesia yang damai dan tentram dengan adanya Islam Nusantara.

Berita ketiga memiliki topik tentang poin deklarasi PKB yang salah satu isinya adalah mendukung Islam Nusantara. Pada teks tersebut, PKB secara jelas mengatakan bahwa Islam Nusantara menjadi solusi dari banyaknya konflik kemanusiaan yang mengatasnamakan agama. PKB juga dalam deklarasinya menyebutkan posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kesadaran ini yang kemudian mengkristal menjadi tanggung jawab untuk terus-menerus menciptakan moderasi Islam agar peradaban Islam menjadi damai.

Pada bagian ini, peneliti berfokus pada *statement* ketua umum PKB yang yakin bahwa poin dari Deklarasi Bali akan diterima oleh masyarakat. Alasan utamanya adalah karena PKB menjadi salah satu pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Hal yang juga menarik adalah, salah satu poin Deklarasi Bali dijadikan bagian dari judul berita. Dengan dipilihnya kata Islam Nusantara masuk dalam judul berita, tentunya ada kesan yang ingin dibangun oleh penulis. Artinya meskipun ada sembilan poin dari sikap politik PKB atau disebut dengan Deklarasi Bali, akan tetapi poin dukungan terhadap Islam Nusantara menjadi hal yang terlihat sangat ditonjolkan.

Dukungan PKB terhadap Islam Nusantara sebenarnya tidak mengejutkan, karena PKB merupakan partai politik yang dianggap telah menjadi representasi dari masyarakat atau anggota Nahdlatul Ulama. Akan tetapi yang menarik adalah wacana Islam Nusantara di wilayah agama sedikit berbeda ketika ia masuk pada wilayah politik.

Jika pada wilayah agama wacana Islam Nusantara adalah bentuk dari Islam yang tetap teguh melestarikan bentuk-bentuk kebudayaan lokal (Khoirurrijal, 2017). Sedangkan wacana Islam Nusantara dalam konteks politik adalah Islam yang mampu menjaga hubungan agama dan negara secara harmonis serta mampu menjaga semangat keindonesiaan.

Simpulan

Islam Nusantara memiliki konsep bahwa Islam dapat dilaksanakan dengan damai, tidak dengan cara memaksa, serta dapat menghargai kearifan lokal. Selain itu, Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi Islam yang menawarkan konsep Islam Nusantara meletakkan hubungan agama dan negara sebagai hubungan yang normatif dan substansial. Bertolak belakang dengan organisasi Islam seperti Hizbut Tahrir yang ingin mendirikan Negara Islam. Dalam menjalankan konsepnya, Islam Nusantara tidak menempatkan negara Islam sebagai tujuan.

Awalnya wacana Islam Nusantara lahir dalam konteks sosial budaya dan keagamaan. Dimana secara historis Islam di Indonesia (Islam Nusantara) mampu mengakomodir tradisi-tradisi (kebudayaan Indonesia) yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi ketika politik identitas mulai mencuat ke permukaan, dan politisasi agama terjadi dimana-mana serta adanya kelompok yang membenturkan agama dan negara, perlahan Islam Nusantara mulai ditarik dalam konteks politik. Pada konteks politik, Islam Nusantara dikatakan sebagai solusi dari banyaknya tindakan kekerasan dan tragedi kemanusiaan yang mengatasnamakan agama. Kemudian Islam Nusantara diyakini sebagai antitesa dari kelompok Islam yang membenturkan Islam dan Negara. Islam Nusantara diwacanakan sebagai Islam yang sesuai dengan Indonesia baik dari segi sosial, budaya, dan politik.

Dalam perjalanannya, Islam Nusantara mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini terlihat dalam beberapa kebijakan Pemerintah seperti meresmikan titik nol Islam Nusantara dan meresmikan Museum Islam Nusantara. Pandangan kedekadatan

Presiden Joko Widodo dengan Islam Nusantara dihubungkan dengan keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Seperti yang diketahui, bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai politik yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, yang merumuskan konsep Islam Nusantara. Meskipun demikian, wacana Islam Nusantara pada konteks politik di media online khususnya *cnnindonesia.com* tidak mendapatkan porsi berita yang banyak. Sepanjang tahun 2019 hanya terdapat lima berita yang membicarakan Islam Nusantara, dan dari lima itu, hanya tiga yang memiliki keterkaitan dengan politik.

Referensi

- Abdurahman, A. I. (2018). Pertarungan Wacana Islam Nusantara di Media Online. *DiMCC Conference Proceeding, 1* (January), 191–204. <http://e-journal.president.ac.id/presunivojs/index.php/DIMCC/article/view/529>
- Abizar, M. (2019). Pluralisme Agama dalam Pandangan Abdul Mukti Ali. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, 1*(2), 185–212.
- Aksa, A. (2017). Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah dan Pengaruhnya di Indonesia. *Yupa: Historical Studies Journal, 1*(1), 1–14.
- Azra, A. (2012). Revisitasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika, 1*(2).
- Humaidi, A. (2017). Struktur Teks, Kognisi Sosial, Dan Dimensi Sosial Pidato Susilo Bambang Yudhoyono (Text Structure, Social Cognition, and Social Dimension Susilo Bambang Yudhoyono'S Speech). *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya, 6*(1), 115.

- _____. (2004). *Shari'at Islam dalam Bingkai Nation State*. Jakarta: Paramadina.
- Van Dijk, T.A. (2005). Politics, Ideology, and Discourse. Dalam Ruth Wodak (Eds.). (2012). *Elsevier Encyclopedia of Language and Linguistics*, Volume on Politics and Language Elsevier.
- Khamdan & Wiharyani. (2018). Islam Nusantara in Political Contestation Identity Religion in Indonesia. *Jurnal ADDIN*, 12 (2).
- Kiftiyah, Al. (2019). Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3 (1).
- Khoirurrijal. (2017). Islam Nusantara Sebagai Counter Hegemoni Melawan Radikalisme Agama di Indonesia. *Jurnal Akademika*, 22 (1).
- Madjid, N. (1992). *Islam, Doktrin, dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Mayrudin Y.M & Akbar M.C. (2019). Pergulatan Politik Identitas Partai-Partai Politik Islam: Studi tentang PAN, PKB dan PKS. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 11 (2).
- Mubarok AA. & Rustam D.G. (2018). Islam Nusantara: Moderasi Islam di Indonesia. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3 (2).
- Safitri, D. (2018). Retorika Islam Nusantara Elit Intelektual NU di Media Online. *Jurnal Komunikasi Islam*, 7(1), 121–140. <https://doi.org/10.15642/jki.2017.7.1.121-140>
- Saprillah. (2018). Gegal Gempita Islam Nusantara di Media Sosial, *Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 4 (1).
- Sachedina, Abdulaziz. (2005). End-Of-Life: The Islamic View. *The Lancet*. 366 (9487).
- Ubaidillah. (2017). Islam Nusantara Dalam Perspektif Pemikiran Liberal Abdurrahman Wahid, *Jurnal Fenomena*, 16 (2).

- Ihsanuddin. (2018). Hakim: HTI Terbukti Ingin Mendirikan Negara Khilafah di NKRI. *Kompas.com*, Mei 07. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/>
- Nurdin, Wahid. (2017). Sebut Negara Thoghut dan Monyet Berseragam Cokelat. *Tribunnews.com*, Oktober 28. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/>
- Hutabarat, Delvira. (2019). Pemerintah Permasalahkan Kata Khilafah di AD/ART FPI. November 28. Diakses dari <https://www.merdeka.com/>
- Fatoni, A. (2015). Jokowi Alhamdulillah Kita Islam Nusantara. *NU online*, Juni 14. Diakses dari <https://www.nu.or.id/post/>
- Erdianto, K. (2017). Kapolri: Islam Nusantara Bisa Menangkal Radikalisme. *Kompas.com*, Januari 19. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/>
- Affan, H. (2015). Polemik di balik istilah 'Islam Nusantara'. *bbc.com*, Juni 15, 2015. <https://www.bbc.com/indonesia/>
- CNNIndonesia.com. (2019). Jokowi Saya Selalu Merasa Adem Kalau Bersam Kiai NU. Januari 31. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>
- CNNIndonesia.com. (2019). Menakar Kekalahan Telak Jokowi dari Prabowo di Sumatra Barat. April 23. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>
- CNNIndonesia.com. (2019). Muktamar PKB Hasilkan Deklarasi Bali, Dukung Islam Nusantara. Agustus 21. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>